

## PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN BAHASA ARAB DI PTAI

Muhammad Muchlish Huda  
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun  
Email: yusmanhuda@yahoo.com

### Abstrak

*Kemampuan berkomunikasi interpersonal, baik secara aktif maupun pasif bisa diibaratkan as the core of the bahasa Arab, dan begitu juga bahasa-bahasa lain. Namun, fakta berbicara, kurikulum-kurikulum bahasa Arab Madrasah atau pondok pesantren di Indonesia, ternyata sebagian besar masih berorientasi pada pembelajaran bahasa Arab preskriptif bukan deskriptif dan kurang concern terhadap fenomena bahasa Arab yang dewasa ini berkembang pesat dengan segala bentuk transformasi kosakata, maupun pemakaiannya. Bahasa Arab di Indonesia, dalam konteks pembelajaran, sepertinya masih baru diposisikan pada tataran preskriptif saja. Pembelajaran bahasa Arab terutama di pesantren-pesantren tradisional masih saja merangkak dan belum beranjak dewasa. Kurikulum dilihat dari aspek teori hubungannya dengan komponen-komponen penunjangnya, memiliki empat elemen penting, di mana keempat element tersebut dapat dijadikan sebagai “lahan basah” dalam kegiatan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan demi terciptanya sebuah formulasi kurikulum yang sesuai dengan landasan filosofis serta selaras dengan tujuan institusional lembaga penyelenggara pendidikan. Keempat elemen tersebut adalah purpose (Goals and Objectives), content or subject matter, methods or learning experiences, evaluation.*

**Kata Kunci:** Kurikulum, Pendidikan Bahasa Arab, PTAI

### Pendahuluan

Bahasa Arab di Indonesia, dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, memiliki historisitas yang cukup kuat. Berbagai spekulasi historis oleh para ahli sejarah memperkirakan bahasa ini mulai dikenal oleh bangsa Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia/Nusantara pada sekitar abad

ke 13 M<sup>1</sup> meskipun keabsahan teori ini masih bersifat *debatable*. Pada perjalanannya yang sangat panjang, perkembangan pembelajaran bahasa Arab yang terjadi di Indonesia bisa dikatakan jalan di tempat. Meminjam istilah Nurcholish Madjid, pembelajaran bahasa Arab yang telah sejak lama berlangsung di Indonesia, terutama di pesantren-pesantren tradisional dimetaforkan dengan istilah “*lagging behind the time*” atau tidak mampu menjawab tantangan zaman. Pernyataan tersebut tentunya dilandaskan pada beberapa pengamatan terstruktur terhadap perkembangan bahasa Arab di Indonesia, dan agaknya patut juga untuk dipertimbangkan.

Kemampuan berkomunikasi interpersonal, baik secara aktif maupun pasif bisa diibaratkan *as the core of the* bahasa Arab, dan begitujuga bahasa-bahasa lain. Namun, fakta berbicara, kurikulum-kurikulum bahasa Arab Madrasah atau pondok pesantren di Indonesia, ternyata sebagian besar masih berorientasi pada pembelajaran bahasa Arab preskriptif bukan deskriptif dan kurang concern terhadap fenomena bahasa Arab yang dewasa ini berkembang pesat dengan segala bentuk transformasi kosakata, maupun pemakaiannya. Bahasa Arab di Indonesia, dalam konteks pembelajaran, sepertinya masih baru diposisikan pada tataran preskriptif saja. Pembelajaran bahasa Arab terutama di pesantren-pesantren tradisional masih saja merangkak dan belum beranjak dewasa.

---

<sup>1</sup> Abdul karim mengakomodir setidaknya ada dua teori tentang masuknya Islam di Nusantara. *Pertama* adalah teori Timur Tengah, diantara pendukungnya adalah Crawford, Keijzer, Naimann, de Hollander termasuk beberapa sejarawan Indonesia –Melayu seperti Hasjmi, al-Attas, Hamka dan Azyumardi Azra. *Kedua* adalah teori India yang disokong oleh Pijnappel, Hurgronje, Moquette, Morison, Kern, Winsted, Fatimi, Vlekke, Schrieke dan Mukti Ali yang mencatat bahwa masuknya Islam ke Nusantara terjadi pada abad ke-13 M (Yusuf dkk, 2006: 34-37). Lihat M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara, 2012), hal. 326.

Kenyataan tersebut menggiring banyak orang dan banyak kalangan pemerhati pembelajaran bahasa Arab di Indonesia mempersoalkan masalah efektifitas kurikulum pembelajaran bahasa Arab di Indonesia yang sampai saat ini, baik dari aspek content-materinya, maupun aspek metodologi pengajarannya, disinyalir belum mampu mengimbangi peningkatan peran bahasa Arab di kancah Internasional. Sebenarnya banyak pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap masalah ini. Mulai dari strategi pembelajarannya yang mungkin kurang tepat, media pembelajaran yang samasekali tidak memadai, minimnya inovasi dalam pembelajaran sampai pada kompetensi Guru Bahasa Arab sebagai hasil studinya pada pendidikan Tinggi yang mungkin saja gagal. Namun dalam artikel ini perhatian akan dicurahkan pada pengembangan kurikulum pada Pendidikan Tinggi Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang memiliki kewenangan sebagai pencetak sarjana dengan kompetensi bidang keilmuan Kependidikan Bahasa Arab.

Dalam lingkup pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program studi pendidikan bahasa Arab, ada empat kompetensi dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh lulusannya. Empat macam kompetensi dan kualifikasi pendidik bahasa Arab tersebut menjadi acuan bagi penyelenggara program studi pendidikan bahasa Arab dalam menyusun dan mendesain kurikulum pembelajarannya.

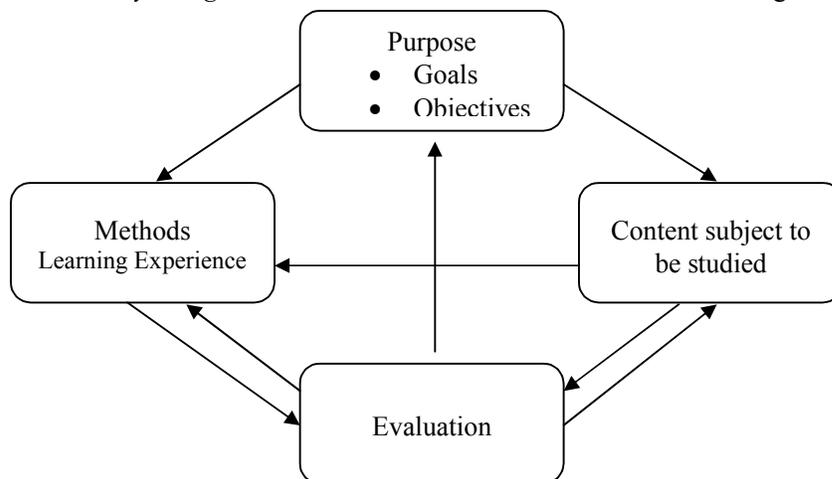
### **Beberapa Element Dalam Pengembangan Kurikulum**

Kurikulum dilihat dari aspek teori hubungannya dengan komponen-komponen penunjangnya, memiliki empat elemen penting, di mana keempat

element tersebut dapat dijadikan sebagai “lahan basah” dalam kegiatan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan demi terciptanya sebuah formulasi kurikulum yang sesuai dengan landasan filosofis serta selaras dengan tujuan institusional lembaga penyelenggara pendidikan. Keempat elemen tersebut adalah *purpose (Goals and Objectives)*, *content or subject matter*, *methods or learning experiences*, *evaluation*. Sinergitas keempat element tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:<sup>2</sup>

Gambar 2.1.

Diadaptasi dari Clayton R. Wright & Judith T. Johnson (Ed) *Curriculum Theory Design and Assessment*. The Commonwealth of Learning, 2000.



- a. Elemen kurikulum yang pertama adalah *purpose* atau tujuan yang mencakup tiga hal prinsip berikut:
  - 1) Tujuan harus didasarkan pada kebutuhan dan harapan masyarakat.
  - 2) Rancangan yang jelas dari arah dan tujuan program pembelajaran yang akan dilakukan.

<sup>2</sup> Clayton R. Wright & Judith T. Johnson (Ed), *Curriculum Theory Design and Assessment* (The Commonwealth of Learning, 2000), hal. 12.

- 3) Kedua prinsip di atas diekspresikan dalam tujuan yang jelas dan konkrit yang biasanya termanifestasikan dalam bentuk visi dan misi institusi pendidikan yang bersangkutan.

Tujuan dan sasaran pendidikan meliputi tiga kategori utama yaitu *Cognitive* yang mengarah pada kemampuan intelektual, *Psychomotor* yang mengarah pada keterampilan motorik dan *affective* yang mengarah pada perasaan dan sikap.

Adapun tujuan kurikulum dirangkum oleh Rusydi Ahmad Thu'aimah dibagi menjadi dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang dimaksud dengan tujuan umum dalam kurikulum adalah tujuan yang berorientasi pada pembekalan pembelajar akan pengetahuan dan wawasan. Adapun tujuan khusus lebih kepada pembekalan terhadap pembelajar akan langkah-langkah dalam merealisasikan dan mewujudkan atau mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkannya.<sup>3</sup>

- b. Elemen kurikulum yang kedua adalah *content or subject matter*. Content kurikulum meliputi isi dan inti pengetahuan yang akan diajarkan pada siswa seperti jika dalam pembelajaran pendidikan bahasa Arab adalah empat *maharoh lughowiyah* dan juga kemampuan paedagogis, rancangan dan outline aspek sikap dan nilai yang ingin diinternalisasikan kepada siswa serta penanaman pendidikan karakter yang ditekankan melalui aturan-aturan atau perundang-undangan institusi yang bersifat lokal.

---

<sup>3</sup> Rusydi Ahmad Thu'aimah, *Manahij Tadrisi al-Lugah al-'Arabiyyah* (Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabiyy, 1998), hal. 50.

- c. Elemen kurikulum ketiga adalah implementasi dalam kurikulum yang memuat metode pembelajaran, pengalaman belajar siswa yang melibatkan strategi pengorganisasian seputar kegiatan pembelajaran.
- d. Adapun elemen terakhir adalah evaluasi dalam kurikulum yang digunakan sebagai langkah untuk memilih materi yang sesuai dengan berdasarkan pada tujuan kurikulum yang telah ditetapkan, memilih metode implementasi yang dapat mengantarkan pada materi dan tujuan, untuk menilai efektivitas metode implementasi pembelajaran yang digunakan, untuk melihat kesesuaian kurikulum apakah telah dapat menjawab kebutuhan masyarakat pengguna lulusan pendidikan, untuk memberikan umpan balik kepada guru, perencana, pengambil kebijakan kurikulum dan masyarakat serta industri pengguna jasa lulusan institusi, menentukan kebijakan perubahan dan pengembangan kurikulum institusi.<sup>4</sup>

Yang perlu dicatat dalam melaksanakan evaluasi adalah bahwa penilaian harus menilai hal-hal seperti, *pertama* masukan (*input*), cara (*means*), isi (*content*), hasil (*output*) dan hasil atau luaran (*outcomes*) dari seluruh proses pembelajaran.

Sudjana mengungkapkan mengenai perubahan dan pengembangan kurikulum. Menurutnya perubahan dan perkembangan struktural

---

<sup>4</sup> Clayton R. Wright & Judith T. Johnson, *Curriculum Theory*, hal. 13.

kurikulum pada umumnya menyangkut elemen-elemen kurikulum seperti berikut<sup>5</sup>:

1. Perubahan dalam tujuan. Perubahan ini didasarkan kepada pandangan hidup masyarakat dan falsafah bangsa. Tanpa tujuan yang jelas dan landasan filosofis yang kuat tidak akan membawa perubahan yang berarti, dan tidak ada petunjuk ke mana pendidikan diarahkan. Sebagai suatu landasan fundamental, filsafat memegang peranan penting dalam proses pengembangan kurikulum. Wina Sanjaya mengungkapkan ada empat fungsi filsafat dalam proses pengembangan kurikulum yakni:
  - a. Filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dengan filsafat sebagai *value system* maka dapat ditentukan mau dibawa ke mana siswa atau mahasiswa tersebut.
  - b. Filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
  - c. Filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Artinya, filsafat sebagai system nilai dapat dijadikan pedoman dalam merancang kegiatan pembelajaran.
  - d. Melalui filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolok ukur keberhasilan proses pendidikan.<sup>6</sup>
2. Perubahan isi dan struktur. Perubahan ini meninjau struktur mata pelajaran-mata pelajaran yang diberikan kepada siswa termasuk isi

---

<sup>5</sup> Nana Sudjana. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah Kejuruan* (Bandung: PT Sinar Baru, 1989), hal. 37.

<sup>6</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 43.

dari setiap mata pelajaran. Perubahan ini dapat menyangkut isi mata pelajaran, aktivitas belajar anak, pengalaman yang harus diberikan kepada anak, juga organisasi atau pendekatan dari mata pelajaran-mata pelajaran tersebut. Apakah diajarkan secara terpisah-pisah (*subject matter curriculum*), apakah lebih Secara umum ada empat tahap dalam pengembangan kurikulum pendidikan, mengutamakan kegiatan dan pengalaman anak (*activity curriculum*) atau diadakan pendekatan interdisipliner (*correlated curriculum*) atau dilihat proporsinya masing-masing jenis ; mana yang termasuk pendidikan umum, pendidikan keahlian, pendidikan akademik dan lain-lain.

3. Perubahan strategi kurikulum. Perubahan ini menyangkut pelaksanaan kurikulum itu sendiri yang meliputi perubahan teori belajar mengajar, perubahan sistem administrasi, bimbingan dan penyuluhan, perubahan sistem penilaian hasil belajar.
4. Perubahan sarana kurikulum. Perubahan ini menyangkut ketenagaan baik dari segi kualitas dan kuantitas, juga sarana material berupa perlengkapan sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, alat peraga dan lain-lain.
5. Perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. Perubahan ini menyangkut metode/cara yang paling tepat untuk mengukur/menilai sejauh mana kurikulum berjalan efektif dan efisien, relevan dan produktivitas terhadap program pembelajaran sebagai suatu sistem dari kurikulum.

Perubahan atau pengembangan kurikulum tersebut dapat bersifat sebagian (pada elemen tertentu), tetapi dapat pula bersifat keseluruhan yang menyangkut semua elemen kurikulum. Perubahan kurikulum menyangkut berbagai faktor, baik orang-orang yang terlibat dalam pendidikan dan faktor-faktor penunjang dalam pelaksanaan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari perubahan kurikulum juga akan mengakibatkan perubahan dalam operasionalisasi kurikulum tersebut.

### **Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum seyogyanya mengikuti prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum agar kurikulum dapat berfungsi sebagai sebuah pedoman yang terstandar. Sejumlah prinsip pengembangan kurikulum yang dianggap penting antara lain:

#### **1. Prinsip relevansi**

Kurikulum dapat diibaratkan sebagai sebuah rel. Artinya, kurikulum yang benar dapat membawa gerbong bernama pendidikan untuk mencapai tujuan yang benar pula. Tujuan yang tidak hanya berorientasi pada pemerolehan ilmu semata akan tetapi juga merealisasikannya ke dalam kehidupan bersosial masyarakat. Untuk itulah, pengembangan kurikulum harus memperhatikan faktor-faktor seperti relevansi.

## 2. Prinsip Fleksibilitas

Prinsip-prinsip ideologis yang dicanangkan oleh instansi pendidikan dalam rancangan kurikulumnya sering tidak sejalan dengan kondisi faktual yang ada di lapangan seperti keterbatasan sarana prasarana sampai SDM guru atau dosen yang tidak mendukung. Maka prinsip fleksibel dalam rancangan kurikulum harus diterapkan oleh pihak yang bertanggung jawab sebagai pengembang kurikulum sehingga kurikulum bisa diterjemahkan ke dalam aksi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kurikulum yang *rigid* dan kaku sulit dilaksanakan.

Menurut Wina, prinsip *fleksibilitas* memiliki dua sisi: *pertama*, fleksibel bagi guru atau dosen. Artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk melakukan improvisasi dan pengembangan model pengajarannya sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Kedua, fleksibel bagi siswa, artinya kurikulum harus juga menyediakan berbagai kemungkinan program materi pilihan sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa.<sup>7</sup>

## 3. Prinsip Kontinuitas

Prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum sangat penting diperhatikan bagi para pengembang. Prinsip kontinuitas bertujuan untuk menjaga hierarki mata pelajaran atau mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Dengan difungsikannya prinsip kontinuitas ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum maka akan

---

<sup>7</sup> Wina, *Kurikulum dan Pembelajaran*, hal. 41.

mensistematisasikan tingkatan pemahaman peserta didik dalam mempelajari semua mata kuliah secara integral.

Di samping itu, prinsip kontinuitas juga berguna untuk meminimalisir dan mereduksi terjadinya pengulangan dan *over lapping* materi perkuliahan yang menyebabkan *inefisiensi* kegiatan belajar mengajar.

#### 4. Efektifitas

Sedikitnya terdapat dua hal dalam prinsip efektifitas dalam pengembangan kurikulum. Yang *pertama*, prinsip efektifitas yang berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kegiatan belajar mengajar. Artinya, pengembang kurikulum harus mempertimbangkan rancangan kurikulumnya dapat terlaksana dengan efektif dalam pembelajaran.

Salah satu langkah dalam mempertimbangkan efektifitas kurikulum adalah dengan memilah dan memilih materi dalam satu mata kuliah tertentu yang dianggap inti dan pendukung. Sehingga materi inti lebih diutamakan daripada materi pendukung. Dengan langkah tersebut, pemrograman waktu perkuliahan yang dalam pedoman kurikulum harus menyelesaikan 14 materi dalam satu semester sebagai misal, akan dapat terselesaikan dengan efektif sesuai dengan waktu yang diprogramkan.

Adapun yang kedua adalah efektivitas kegiatan siswa yang berhubungan dengan sejauh mana mahasiswa mencapai target dan

kompetensi kurikulum yang telah ditentukan sesuai dengan jangka waktu tertentu.

### 5. Efisiensi

Prinsip efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya, tenaga dan waktu yang seminimal mungkin dapat memperoleh hasil yang maksimal. Kurikulum yang kelewat ideal dengan tuntutan sarana prasarana yang sulit untuk dipenuhi oleh pihak instansi pendidikan terkait serta sulit untuk dilaksanakan maka bisa dikatakan bahwa kurikulum tersebut tidak efisien.

### 6. Sekuens (*Sequences*)<sup>8</sup>

Sekuens berarti susunan atau urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan kurikulum. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam prinsip sekuens adalah: mulai dari yang paling sederhana menuju yang kompleks, menuruti alur kronologis, balikan dari alur kronologis, mulai dari keadaan geografis yang dekat sampai ke yang jauh, dari jauh menuju dekat, dari konkret ke abstrak, dari umum ke khusus.

### 7. Integrasi

Para pengembang kurikulum harus memperhatikan masalah pengintegrasian materi pelajaran. Namun tidak seperti keenam prinsip

---

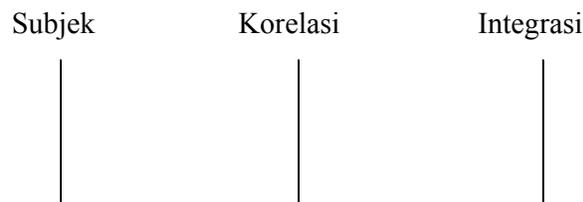
<sup>8</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hal. 47-48.

sebelumnya, prinsip pengintegrasian ini bersifat optional. Kurikulum adalah suatu hal yang bersifat integratif. Kadar keintegrasian tersebut ditentukan oleh dasar filosofis pengembang kurikulum dibandingkan dengan data empiris.

Namun karena terdapat beberapa materi yang harus diajarkan secara terpisah maka kalangan progressif menawarkan agar para pengajar, sebagai pengembang kurikulum, memposisikan dirinya pada *continuum* (rangkaiian) pendidikan seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.2.

#### Kontinum Pendidikan



Korelasi mata pelajaran (*Correlation of subject matter*) yaitu hubungan di antara mata pelajaran yang masih ada unsure keterpisahannya seperti dalam materi psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan, *Imla' Khot* dan *Insya'*, *muhadatsah* dan *Istima'*. Korelasi akan menjadi integrasi jika identitas masing-masing dilepaskan.

## Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PBA di PTAI

### 1. Perencanaan Kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa Arab

Dalam menyusun kurikulum pendidikan harus didahului oleh sebuah perencanaan matang yang meliputi perencanaan terhadap keempat komponen kurikulum (Tujuan, isi, implementasi dan evaluasi) di atas. Menurut Hilda Taba dalam proses perencanaan kurikulum, perencana setidaknya harus mengikuti tujuh langkah perencanaan kurikulum sebagai berikut:

1. Diagnosis of needs
2. Formulation of objectives
3. Selection of content
4. Organization of content
5. Selection of learning experiences
6. Organization of learning experiences
7. Determination of what to evaluate and of the ways and means of doing it.<sup>9</sup>

Kurikulum mendesain pengalaman belajar yang mungkin dapat dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan tujuan, visi dan misi institusi pendidikan yang bersangkutan. Pengalaman belajar tersebut selain mempertimbangkan karakteristik institusi juga harus mempertimbangkan keberagaman latar belakang peserta didiknya. Hal tersebut sangat penting untuk mengenali rentang, perbedaan dan keberagaman kemampuan peserta didik. Karena itulah langkah perencanaan kurikulum berupa *diagnosis of needs* atau mengenali dan mendiagnosa kebutuhan instansi.

---

<sup>9</sup> Hilda Taba, *Curriculum Development Theory and Practice* (San Francisco State College: Harcourt, Brace and World Inc, 1962), hal. 12.

Kurikulum dalam konteks implementasinya dalam kegiatan belajar mengajar harus sesuai dan sejalan dengan Visi dan misi instansi tersebut. Rumuan visi dan misi instansi yang terencana dan terukur akan menjadi pondasi dan landasan filosofis implementasi kurikulum dalam lembaga tersebut. E. Mulyasa mengungkapkan bahwasannya setidaknya visi dan misi harus mempertimbangkan dua kekuatan.<sup>10</sup> Pertama kekuatan yang berhubungan dengan apa yang sedang berlangsung di luar sekolah dan yang kedua adalah kekuatan yang berhubungan dengan klien pendidikan yaitu latar belakang sosial, aspirasi keuangan, sumber-sumber masyarakat dan karakteristik lingkungan. Pemegang otoritas PBA dalam hal ini adalah kaprodi, dalam mengembangkan visinya harus mampu menyeleksi secara berkelanjutan atas kelompok-kelompok kekuatan tersebut.

Langkah *formulation of objectives* dalam perencanaan kurikulum pendidikan bahasa Arab akan mengacu pada kompetensi yang ditetapkan oleh pihak Program Studi. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi baik dalam bidang bahasa Arab maupun pengajarannya yang harus dikuasai oleh para peserta didik. Secara teoritis komponen kompetensi yang harus ada dalam pengajaran bahasa kedua setidaknya akan tergambar seperti dalam gambar berikut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hal. 177.

<sup>11</sup> Lyle F. Bachman, *Fundamental Considerations In Language Testing* (New York: Oxford University Press, 1990), hal. 87, dalam H. Douglas Brown, *Principles of Language Learning and Teaching* (San Fransisco: San Fransisco State University, 2000), hal. 249.

Gambar 2.3.

## Komponen Pembelajaran Bahasa Kedua

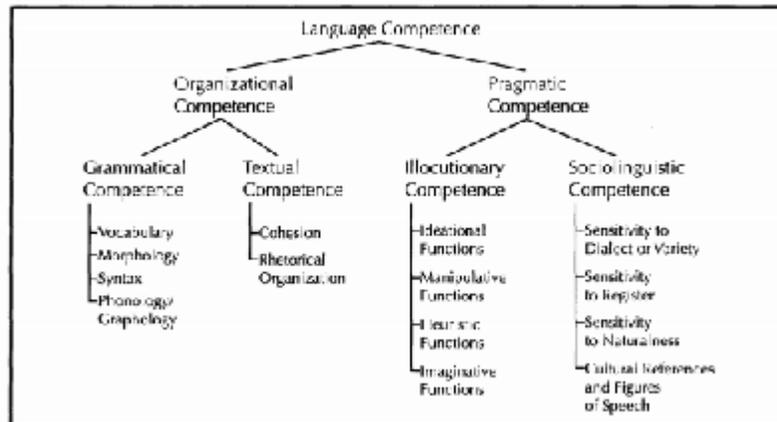


Figure 9.1. Components of language competence (Bachman 1990: 87)

Dalam model skematisasi yang digambarkan oleh Lyle Bachman di atas ia menempatkan kompetensi gramatikal dan wacana (dinamakan kembali “tekstual”) di bawah satu cabang yang dengan tepat dia sebut sebagai kompetensi organisasi. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat teknis yang berhubungan dengan pengajaran bahasa seperti itulah yang diperlukan untuk menyusun dan mengorganisir kepingan-kepingan mata kuliah dalam prodi PBA menjadi satu pengetahuan utuh mengenai bahasa Arab.

Langkah *selection of content* dan langkah *organization of content* dalam perencanaan pengembangan kurikulum mencirikan sebuah usaha dari para perencana untuk memerikan materi dan mengorganisasikannya. Pemerian dan pengorganisasian materi untuk kurikulum ini akan sangat berhubungan dengan pembelajaran karena pemerian dan pengorganisasian kurikulum ditujukan antara lain untuk melihat validitas

dan signifikansi materi yang akan disusun dalam kurikulum, menentukan perbedaan yang jelas dalam tingkatan materi yang bervariasi dan menentukan level pengembangan materi tersebut.

Di Amerika Serikat, konsep pemerian materi dan pengorganisasian materi dalam instansi pendidikannya memunculkan konsep yang dualistik. Dualisme tersebut yakni antara materi yang berorientasi pada kegunaan (*useful*) dan materi yang berorientasi pada keindahan (*ornamental*).<sup>12</sup> Istilah *useful* dalam konteks pemerian dan pengorganisasian materi mengandung dua pengertian. Yang pertama dalam bentuk penguasaan ketrampilan (*skill*) dan yang kedua dalam bentuk pemahaman secara umum terhadap materi (*general understanding*).

Ketrampilan (*skill*) merupakan kecakapan-kecakapan khusus yang harus dikuasai oleh peserta didik sebagai bekal hidupnya ketika kembali ke masyarakat. Adapun pemahaman umum (*general understanding*) adalah penguasaan terhadap hal-hal umum yang berhubungan dengan masalah kehidupan baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Adapun materi yang berorientasi pada keindahan (*ornamental*) adalah penguasaan terhadap pengetahuan yang memuaskan rasa ingin tahu (*curiosity*) peserta didik. Adapun langkah *selection and organization learning experiences* dalam perencanaan kurikulum berhubungan dengan strategi dalam aplikasi teknis pembelajaran.

---

<sup>12</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), hal. 128.

Terakhir adalah *Determination of what to evaluate and of the ways and means of doing it*. Perencanaan dibuat untuk dievaluasi. Bagaimanakah seharusnya kualitas kurikulum dapat dievaluasi untuk mengukur bahwa akhir dari studi yang telah terencana dalam kurikulum telah tercapai sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Evaluasi harus mengawal konsistensi antara tujuan dan kegiatan pembelajaran aktual yang dilakukan oleh peserta didik.

Diagram alir berikut ini menggambarkan dengan gamblang urutan dalam penyusunan kurikulum pada program studi di perguruan tinggi:

Gambar 2.4.

Diagram alir penyusunan kurikulum pada Perguruan Tinggi,



Diadaptasi dari Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum

Pendidikan Tinggi (KPT) Kemendikbud Dirjen Pendidikan Tinggi

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2012.

## 2. Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum adalah pengejawantahan atas perencanaan kurikulum yang telah disusun. Jika merujuk pada ketujuh perencanaan pengembangan kurikulum oleh Hilda Taba di atas, maka setidaknya implementasi kurikulum akan berkuat pada bahasan mengenai tujuan dan visi misi PTAI yang kemudian disesuaikan dengan aspek yuridis undang-undang dalam menyusun Standar Kompetensi Lulusan.

Implementasi juga akan memperhatikan acuan utama yang dipakai oleh Perguruan Tinggi baik PTU atau PTA dalam pengembangan kurikulumnya. Secara yuridis, acuan dalam pengembangan kurikulum dan implementasinya tersebut adalah Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional dan Kepmendiknas No. 232/U/2000. Menurut kedua undang-undang tersebut bahwasannya yang menjadi dasar implementasi kurikulum program studi terdiri atas dua kurikulum sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Kurikulum inti. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum inti terdiri atas kelompok matakuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya. dan cara

---

<sup>13</sup> Kepmendiknas 232/U/Tahun 2000 Pasal 7 Tentang Kurikulum Inti dan Kurikulum Instiusional. File pdf. Diakses pada tanggal 02 April 2014.

berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.

Kurikulum inti program sarjana dan program diploma terdiri atas:

- a) Kelompok MPK;
- b) Kelompok MKK;
- c) Kelompok MKB;
- d) Kelompok MPB;
- e) Kelompok MBB.

Kurikulum inti program sarjana sebagaimana dimaksud di atas berkisar antara 40% - 80% dari jumlah SKS kurikulum program sarjana. Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma ditetapkan oleh Menteri.

2. Kurikulum institusional. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dan kurikulum Perguruan Tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Seluruh Kurikulum institusional untuk setiap program studi pada program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi.

Adapun pembaruan konsep kurikulum perguruan tinggi yang tertuang dalam kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002, yang mengacu pada konsep pendidikan tinggi abad XXI UNESCO (1998), dijelaskan oleh DIRJEN Pendidikan Tinggi terdapat pembaruan yang radikal dan mendasar yaitu<sup>14</sup>:

- a. Luaran hasil pendidikan tinggi yang semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu Program studi, diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Luaran hasil pendidikan tinggi ini yang semula penilaiannya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri, dalam konsep yang baru penilaian selain oleh perguruan tinggi juga dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan.
- b. Kurikulum program studi yang semula disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah lewat sebuah Konsorsium (Kurikulum Nasional), diubah, yakni kurikulum inti disusun oleh perguruan

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum*, hal. 8.

tinggi bersama-sama dengan pemangku kepentingan dan kalangan profesi, dan ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

- c. Berdasarkan Kepmendikbud No. 056/U/1994 komponen kurikulum tersusun atas Kurikulum Nasional (Kurnas) dan Kurikulum Lokal (Kurlok) yang disusun dengan tujuan untuk menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (*content based*), sedangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 disebutkan bahwa kurikulum terdiri atas Kurikulum Inti dan kurikulum Institusional. Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi utama, ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Sedangkan Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan berhubungan dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi (Kepmendiknas No.045/U/2002).
- d. Dalam Kurikulum Nasional terdapat pengelompokan mata kuliah yang terdiri atas: Mata Kuliah Umum (MKU), MataKuliah Dasar Keahlian (MKDK), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK). Sedangkan dalam Kepmendiknas no 232/U/2000 Kurikulum terdiri atas kelompok-kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian

Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB). Namun, pada Kepmendiknas No.045/U/2002, pengelompokan mata kuliah tersebut diluruskan maknanya agar lebih luas dan tepat melalui pengelompokan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu:

- 1) Landasan kepribadian
- 2) Penguasaan ilmu dan keterampilan
- 3) Kemampuan berkarya.
- 4) Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- 5) Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Implementasi kurikulum dengan beberapa aspek penekanan materi dan pengelompokannya adalah masalah substansial dalam pengembangan kurikulum. Hal tersebut menjadi lebih substansial lagi bagi instansi penyelenggara pendidikan yang berparadigma proses dan bukan berparadigma hasil, dan masalah pokok dalam implementasi kurikulum menurut Hasan selalu saja berputar pada dua hal pokok yakni persoalan yang berhubungan dengan kenyataan kurikulum yang ada dan berlaku serta persoalan kemampuan pengajar untuk melaksanakannya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hasan, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Berdasarkan SK Mendiknas 232/U/2000 dan Alternatif Pemecahannya* (Bandung: UPI, 2002), hal. 100.

### 3. Evaluasi Kurikulum

Kurikulum sebagai alat pendidikan selalu harus dipantau dan dikendalikan agar kurikulum tersebut senantiasa dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan terhadap kurikulum adalah termasuk dalam aktifitas pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu kegiatan sistematis serta terencana yang terdiri atas empat komponen kurikulum yakni tujuan kurikulum, content atau materi yang hendak diajarkan, metode pembelajaran yang masuk dalam ranah implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Keempat komponen pengembangan kurikulum ini saling terkait dan menjadi kesatuan utuh keseluruhan proses pengembangan kurikulum.

Sebagai bagian dari komponen dalam kurikulum, evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan sejak perumusan tujuan kurikulum, implementasi, dan sampai kepada saat di mana hasil kurikulum sudah memiliki dampak kepada lulusan.

Evaluasi dalam proses perumusan tujuan kurikulum dan dokumen kurikulum dilakukan untuk mendapatkan masukan mengenai kesesuaian ide dan desain kurikulum untuk mengembangkan kualitas yang dirumuskan dalam Standar Kompetensi lulusan (SKL). Evaluasi terhadap implementasi dilakukan untuk memberikan masukan terhadap proses pelaksanaan kurikulum agar sesuai dengan apa yang telah dirancang dalam dokumen.

Evaluasi terhadap ide dan dokumen kurikulum dilakukan terhadap upaya mencari informasi dan memberikan pertimbangan berkenaan dengan keajekan konsistensi ide kurikulum untuk mengembangkan kualitas yang diharapkan, dan keajekan desain kurikulum dengan model dan prinsip pengembangan kurikulum. Evaluasi terhadap ide kurikulum menentukan apakah filosofi, teori, dan model yang akan dikembangkan telah mampu memenuhi fungsi kurikulum dalam mempersiapkan generasi muda bangsa untuk menjalani kehidupan sebagai seorang individu dan warga negara di masa yang akan datang sebagaimana ditetapkan dalam SKL.

Evaluasi kurikulum dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu program pendidikan yang menjadi rujukan inti pelaksanaan sistem pendidikan nasional.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 77Q ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, dinyatakan bahwa evaluasi kurikulum merupakan upaya mengumpulkan dan mengolah informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas

pelaksanaan kurikulum pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan.<sup>16</sup>

Evaluasi dokumen kurikulum mencakup kegiatan penilaian terhadap:

- a. Dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan (kerangka dasar dan struktur kurikulum);
- b. Dokumen kurikulum setiap mata pelajaran (silabus)
- c. Pedoman implementasi kurikulum (pedoman penyusunan dan pengelolaan KTSP, pedoman umum pembelajaran, pedoman pengembangan muatan lokal, dan pedoman kegiatan ekstrakurikuler.
- d. Buku teks pelajaran.
- e. Buku panduan guru; dan
- f. Dokumen kurikulum lainnya.

Secara garis besar konsep/model evaluasi kurikulum yang telah dikembangkan selama ini dapat digolongkan ke dalam empat rumpun model yakni *measurement*, *congruence*, *illumination* dan *educational system evaluation*.

Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum yang diterapkan ditinjau dari beberapa kriteria. Menurut R. Ibrahim dan Masitoh indikator kinerja yang dievaluasi meliputi Efektivitas, Relevansi, Efisiensi, dan Kelaikan (*feasibility*).

---

<sup>16</sup> Lampiran V Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a tahun 2013 Tentang Implementasi kurikulum. Filetype: Pdf. Diakses pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014.

1. Efektivitas; yaitu sejauh mana program kurikulum yang sudah dirancang dapat berjalan dan dapat dilaksanakan secara optimal, mencapai tujuan yang diharapkan serta sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
2. Relevansi; yaitu berhubungan dengan kesesuaian, yakni apakah program kurikulum yang dirancang memiliki kesesuaian terutama dilihat dari kebutuhan siswa, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Efisiensi; yakni sejauhmana program kurikulum yang telah dirancang dan dipersiapkan itu selain telah berjalan sesuai dengan rencana (waktu), juga sebanding dengan pembiayaan yang dikeluarkan.
4. Kelaikan (*feasibility*); apakah kurikulum yang dilaksanakan itu masih dipandang memiliki kelaikan yang dapat dipertahankan terutama dilihat dari tuntutan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan zaman, masa kini dan jauh melihat perkembangan kedepan, baik dalam tatanan kehidupan nasional, regional, maupun anitisipasi kehidupan global.<sup>17</sup>

## Penutup

Kemampuan berkomunikasi interpersonal, baik secara aktif maupun pasif bisa diibaratkan *as the core of the* bahasa Arab, dan begitujuga bahasa-bahasa lain. Namun, fakta berbicara, kurikulum-

---

<sup>17</sup> Suplemen Bahan Ajar, *Pengembangan Evaluasi Kurikulum*, hal. 200. Filetype: Pdf. Diakses pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014.

kurikulum bahasa Arab Madrasah atau pondok pesantren di Indonesia, ternyata sebagian besar masih berorientasi pada pembelajaran bahasa Arab preskriptif bukan deskriptif dan kurang *concern* terhadap fenomena bahasa Arab yang dewasa ini berkembang pesat dengan segala bentuk transformasi kosakata, maupun pemakaiannya. Bahasa Arab di Indonesia, dalam konteks pembelajaran, sepertinya masih baru diposisikan pada tataran preskriptif saja. Pembelajaran bahasa Arab terutama di pesantren-pesantren tradisional masih saja merangkak dan belum beranjak dewasa.

Bahasa Arab di Indonesia, dalam konteks pembelajaran, sepertinya masih baru diposisikan pada tataran preskriptif saja. Pembelajaran bahasa Arab terutama di pesantren-pesantren tradisional masih saja merangkak dan belum beranjak dewasa. Kurikulum dilihat dari aspek teori hubungannya dengan komponen-komponen penunjangnya, memiliki empat elemen penting, di mana keempat element tersebut dapat dijadikan sebagai “lahan basah” dalam kegiatan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan demi terciptanya sebuah formulasi kurikulum yang sesuai dengan landasan filosofis serta selaras dengan tujuan institusional lembaga penyelenggara pendidikan. *Keempat elemen tersebut adalah purpose (Goals and Objectives), content or subject matter, methods or learning experiences, and evaluation.*

### Daftar Pustaka

- Bachman, Lyle F. 1990. *Fundamental Conciderations In Language Testing*. New York: Oxford University Press.
- Hamalik, Oemar. 2008. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Hasan. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Berdasarkan SK Mendiknas 232/U/2000 dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: UPI.
- Mulyasa, E. 2009. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Karim, M. Abdul. 2012. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Sanjaya, Wina. 2010. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Sudjana, Nana. 1989. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah Kejuruan*. Bandung: PT Sinar Baru.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 1997. *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Taba, Hilda. 1962. *Curriculum Development Theory and Practice*. San Francisco State College: Harcourt, Brace and World Inc.
- Thu'aimah, Rusydi Ahmad. 1998. *Manahij Tadrasi al-Lugah al-'Arabiyyah*. Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabiy.
- Wright, Clayton R. 2000. *Curriculum Theory Design and Assessment*. The Commonwealth of Learning.
- Kepmendiknas 232/U/Tahun 2000 Pasal 7 Tentang Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional. File pdf. Diakses pada tanggal 02 April 2014.
- Lampiran V Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a tahun 2013 Tentang Implementasi kurikulum. Filetype: Pdf. Diakses pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014.

Suplemen Bahan Ajar, *Pengembangan Evaluasi Kurikulum*. Filetype: Pdf.  
Diakses pada hari kamis tanggal 01 Mei 2014.